

## **HANDOUT MATAKULIAH: PROPAGANDA**

PRODI: ILMU KOMUNIKASI FISIP UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Semester: Genap 2010/2011

### **Pertemuan 16**

#### **Analisa Kelompok : GOLKAR VS DEMOKRAT<sup>1</sup>**

*Oleh: Kamaruddin Hasan<sup>2</sup>*

##### ***Apa Pemerintah Berwenang Bekukan Kepengurusan PSSI?***

Dunia sepakbola Tanah Air saat ini tengah didera konflik. Ketua Umum PSSI Nurdin Halid dituntut mundur oleh ribuan pecinta sepakbola di Tanah Air. Aksi penolakan pun digelar hingga pelosok daerah. Nurdin dinilai tak layak lagi menjabat sebagai Ketua PSSI karena prestasi sepakbola nasional tak kunjung membaik. Selain itu, Nurdin sudah menjabat selama dua periode atau sepuluh tahun. Namun, sejumlah pihak menilai ada kalangan tertentu yang memiliki kepentingan dalam kisruh PSSI ini.

Partai Golkar dan Demokrat dituding memiliki kepentingan besar dalam memontum ini. Setidaknya, itulah yang dilontarkan pengamat politik Fadjoel Racman. "Partai Golkar ada dibelakang Nurdin Halid, dan Partai Demokrat dan pemerintah ada dibelakang Arifin Panigoro. Siapapun akhirnya yang menang, mereka tetap akan saling menggergaji," ungkap Fadjoel kepada okezone. Aktivis yang sempat mendekam di Nusa Kambangan pada zaman Orde Baru ini menilai, perebutan jabatan ketua PSSI akan menjadi tolak ukur bagi pemilu 2014 mendatang. Sebab, jabatan ketua umum PSSI memiliki pengaruh cukup besar. "Sebagai pecinta sepakbola nasional, saya ingin yang menjadi ketua PSSI bukanlah keduanya (Nurdin dan Arifin), tetapi ada figur baru yang lebih faham tentang sepakbola. Hal ini agar sepakbola tidak dipolitisasi lagi," tandasnya. Partai Demokrat tidak mudah mengeluarkan Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Setgab koalisi. Demokrat harus menghitung untung dan rugi, bila mengeluarkan kedua partai yang mengusulkan hak angket pajak tersebut. "Inilah resikonya, karena Indonesia menganut sistim politik kembar, yaitu sistem presidensial dan parlementer sekaligus. SBY maju

---

<sup>1</sup> Diambil dari berbagai sumber

<sup>2</sup> Dosen prodi ilmu komunikasi Fisip Unimal

kena mundur kena, sebuah *cost* politik yang mahal," kata politisi senior Partai Golkar, Zainal Bintang, kepada **Rakyat Merdeka Online** sesaat lalu (Selasa, 1/3). Menurut Bintang, ketegangan antara Demokrat dan Golkar terjadi, karena dasar koalisi Setgab tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, sehingga komitmen antar-anggota Setgab sangat rentan untuk berubah-ubah. Interpretasi makna koalisi ditentukan oleh kepentingan dan keuntungan masing-masing partai, seperti terjadi dalam kasus Centurygate maupun angket mafia pajak. Masih kata Bintang, tekanan Demokrat meminta Golkar dan PKS keluar koalisi juga menuntut harga mahal yang harus dibayar SBY. Pembela SBY di parlemen akan semakin melemah dan pasti tidak mampu melawan Golkar dan PKS bila berposisi. Tentu saja, bila kedua partai ini memutuskan berada di luar pemerintahan, maka kebijakan dan program pemerintah gampang terjegal.

Silang pendapat antara Partai Demokrat dan Golkar, di tingkat elit mulai mereda. "Sudah selesai," kata Andi Mallarangeng, juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Istana, Jakarta Pusat, Rabu 11 Februari 2009. Namun, Andi mengaku tidak mengetahui bagaimana detail bentuk penyelesaiannya masalah itu. Apakah penyelesaian itu terjadi setelah Yudhoyono menelepon Kalla yang tengah berada di Den Haag, Belanda, Andi mengatakan, "Tidak ada itu. Kan, ada perbedaan waktu di sana dengan di sini." Memanasnya hubungan antara Demokrat dan Golkar terjadi setelah muncul pernyataan Achmad Mubarak, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat di media massa yang terbit Selasa 10 Februari 2009. Intinya, Mubarak bicara kemungkinan calon wakil presiden lain di luar Jusuf Kalla, Ketua Umum Golkar yang juga Wakil Presiden.

Salah satu media, menyebut Mubarak hanya memberi contoh saja. Dia mengatakan kalau suara Golkar 2,5 persen, dan PKS 20 persen, maka Demokrat akan menggandeng partai yang lebih besar suaranya. Satu media lagi malah menyebutkan, Mubarak memprediksi suara Golkar cuma 2,5 persen. Jusuf Kalla mengatakan pernyataan itu merupakan mimpi buruk bagi orang yang berbicara. Dari sinilah muncul cerita keretakan hubungan Demokrat dan Golkar. Cerita ini baru mereda setelah Presiden Yudhoyono memberi keterangan pers pada Selasa 10 Februari 2009. "Demokrat bersahabat dengan Golkar," katanya.

“Demokrat tak menihilkan Golkar.” Dua partai raksasa, Golkar dan Demokrat ternyata tak berhenti perang dingin. Walau tetap tergabung dalam koalisi, tapi dua partai itu terus berseteru.

Di dunia nyata, keduanya sering berseberangan. Yang terakhir, tatkala Sidang Paripurna DPR membahas hak angket, kubu Golkar kandas dibikin kubu Partai Demokrat (PD). PD kemudian memperbaiki kontrak koalisi. Golkar tetap bergabung. Tapi, perang terus berlangsung.

Di dunia maya, perang itu sungguh terjadi. Selasa 10 Mei 2011 lalu, dua pentolan partai itu saling serang. *Locus delicty*-nya ada di *twitter*. Muhammad Sukri, pengurus DPP PD, mulai dulu menyerang Golkar. Lewat akun *twitter*-nya, *sukridemokrat*, dia sempat memposting, “*Kini marak politisi gunakan media untuk menyambung fitnah guna capai tujuannya..*” Bisa dibaca kasatmata, postingan itu tentu menyindir Aburizal Bakrie, ketua umum Golkar, yang memiliki saham di beberapa media nasional.

Nurdin Halid dituntut mundur oleh ribuan pecinta sepakbola di Tanah Air. Aksi penolakan pun digelar hingga pelosok daerah. Nurdin dinilai tak layak lagi menjabat sebagai Ketua PSSI karena prestasi sepakbola nasional tak kunjung membaik. Selain itu, Nurdin sudah menjabat selama dua periode atau sepuluh tahun. Namun, sejumlah pihak menilai ada kalangan tertentu yang memiliki kepentingan dalam kisruh PSSI ini. Partai Golkar dan Demokrat dituding memiliki kepentingan besar dalam memontum ini. Setidaknya, itulah yang dilontarkan pengamat politik Fadjroel Racman. “Partai Golkar ada dibelakang Nurdin Halid, dan Partai Demokrat dan pemerintah ada dibelakang Arifin Panigoro.

Siapa pun akhirnya yang menang, mereka tetap akan saling menggergaji,” ungkap Fadjroel kepada okezone, Aktivis yang sempat mendekam di Nusa Kambangan pada zaman Orde Baru ini menilai, perebutan jabatan ketua PSSI akan menjadi tolak ukur bagi pemilu 2014 mendatang. Sebab, jabatan ketua umum PSSI memiliki pengaruh cukup besar. “Sebagai pecinta sepakbola nasional, saya ingin yang menjadi ketua PSSI bukanlah keduanya (Nurdin dan Arifin), tetapi ada figur baru yang lebih faham tentang sepakbola. Hal ini agar sepakbola

tidak dipolitisasi lagi,” tandasnya. Dalam kisruh seperti ini, lanjutnya, dibutuhkan gerakan ketiga atau tokoh alternatif untuk menyelamatkan PSSI. Soal siapa orang yang dimaksud, Fadjoel menyerahkan kepada publik. “IGK Manila juga bagus, atau siapa saja yang menjadi alternatif. Yang pasti jangan lagi sepakbola dipolitisasi,” tukasnya.

### ***PSSI Pertarungan "Harga Diri" Golkar vs Demokrat***

Kejagalan keputusan tim seleksi dan tim verifikasi pemilihan ketua umum PSSI yang hanya meloloskan dua kandidat yakni Nurdin Halid dan Nirwan Bakrie mulai masuk ke ranah politik. Pemilihan ketua umum PSSI yang akan digelar melalui mekanisme kongres PSSI di Bali pada Maret mendatang tak ayal disamakan dengan pertarungan antara Partai Demokrat dan Partai Golkar terkait tak lolosnya beberapa kandidat calon ketua. Ini bisa dilihat dari komentar tokoh-tokoh politik melalui jejaring twitter. Wakil Ketua MPR RI yang juga Ketua DPP PPP, Lukman Hakim Saefuddin, dalam akun twitternya langsung menanggapi tidak lolosnya KASAD Jenderal TNI George Toisutta dan pendiri LPI Arifin Panigoro. "Bikin PSSI Perjuangan aja," kata Lukman Hakim dalam akun twitternya. Tanggapan ini dikomentari oleh followernya @ipangwahid yang mengatakan George Toisutta dan Arifin Panigoro pun terjanggal sebagai calon ketua PSSI. Golkar lu lawan..".

Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum juga tak kalah berkomentar melalui akun twitternya. "Sayang sekali hanya dua orang yang lolos verifikasi. Apakah FIFA tidak bisa melakukan koreksi?,". Tanggapan Anas tersebut juga dikomentari oleh seorang kader Golkar Indra J Piliang. Ia mengatakan, tidak ada kaitannya antara pemilihan calon ketum PSSI dengan Partai Golkar. "Kejauhan mengait-ngaitkan PSSI dengan Partai Golkar, emang FIFA itu partainya apa? kok bertahun-tahun tak ganti ketua. FIFA itu bukan induk dari parpol, tetapi induk dari organisaasi sepakbola sejagat raya. Kok dipolitisir sih," Indikasi dijadikannya Kongres PSSI sebagai arena pertarungan politik antara Partai Golkar dengan Partai Demokrat semakin menguat.

Partai Demokrat menyokong penuh kebijakan Menegpora Andi Mallarangeng membekukan kepengurusan Nurdin Halid. Sementara petinggi Partai Golkar mulai mempertanyakan payung hukum

kebijakan Andi Mallarangeng. “Menurut saya apa yang disinyalir mulai kelihatan. Kongres PSSI menjadi pertarungan Partai Demokrat dan Partai Golkar. Kalau ini tak segera diselesaikan secara profesional, akhirnya tak ada orang bicara sepakbola, tapi politik,” ujar pengamat politik dari President University AS Hikam kepada **okezone** di Jakarta.

Padahal, sambung Hikam, PSSI adalah organisasi masyarakat sipil dan pada umumnya lembaga semacam ini paling alergi diintervensi oleh kekuatan politik mana pun. Sama seperti organisasi profesi, serikat buruh, dan organisasi cendekiawan. “Namun ketika Nurdin dan Andi Mallarangeng menggunakan pendekatan kekuasaan akhirnya mau tak mau PSSI terkontaminasi kepentingan politik. Sekarang sudah mulai dukung-mendukung. Pertanyaan mengenai aturan hukum sudah mulai dimunculkan dan Nurdin pun mulai memasang kuda-kuda ‘harga diri’ PSSI yang tentu bisa jadi harga diri Golkar,” urainya. Mantan Menristek era kepemimpinan Gus Dur ini berharap, baik Nurdin maupun Andi sama-sama menurunkan tensi konflik dan fokus mencari solusi permasalahan di tubuh PSSI dengan segera menggelar kongres lanjutan.

=====